

KEPUTUSAN-KEPUTUSAN PLENO

AGUSTUS LEKRA

Sidang Pleno ke-II Pimpinan Pusat Lekra, yang selanjutnya dinamakan "Pleno Agustus 1960 PP LEKRA", yang berlangsung di Djakarta pada tanggal 31 Agustus 1960, sesudah meneliti dan mendiskusikan Laporan Umum Sekretariat Pimpinan Pusat LEKRA yang disampaikan oleh Kawan Joebaar Ajob, menyetujui dan memperkuat Laporan Umum tersebut, sebagai Laporan pekerjaan dan kebidaksanaan yang telah dijalankan oleh Sekretariat PP LEKRA antara masa sidang pleno ke-I dan ke-II.

Tentang Garis Umum Kegiatan

Plenp Agustus 1960 PP LEKRA, memperkuat Laporan Umum SPP LEKRA yang meminta perhatian segenap anggota LEKRA dan pekerja kebudayaan Rakyat umumnya, supaya terus mempeladjar dan mengenalkan "MUKADIMAH LEKRA", supaya terus mempeladjar dan melaksanakan garis umum yang telah ditunjukkan oleh "LAPORAN UMUM LEKRA kepada KONGRES NASIONAL Ke-I, beserta seluruh PUTUSAN-PUTUSAN dan Resolusi Kongres".

Sidang Pleno dengan gembira menjambut kegiatan-kegiatan kebudayaan Rakyat yang diwaktu-waktu terakhir ini dengan sadar telah dan sedang melaksanakan arah kegiatan "MELUAS dan MENINGGI", garis pentjiptaan "DUA TINGGI" serta metode kerja "TURUN KEBAWAH". Dan disamping itu Pleno Agustus PP LEKRA ingin pula menjerukan kepada seniman-seniman maupun sardjana-sardjana Rakyat supaya menghubungkan kerja-kerja mereka dengan "KEKINIAN" yang revolusioner. Tentang sikap umum LEKRA, yaitu "POLITIK ADALAH PANGLIMA" juga, walaupun orang tjoba menentangnja dengan politik "SENI dan ILMU DJANGAN TJAMPUR POLITIK", serta bermacam dalih lainnya yang palsu dan menjesatkan, namun kehidupan dan pekerjaan kebudayaan itu sendiri dari hari demi hari telah membuktikan kebenaran sikap umum LEKRA, yakni "POLITIK ADALAH PANGLIMA".

Kepada seluruh anggota LEKRA dan Pekerja Kebudayaan Rakyat umumnya, Sidang Pleno menjerukan supaya terus memeladjar dan menuangkan garis-garis umum kegiatan dan pentjiptaan itu kedalam pekerjaan sehari-harinja.

Tentang Demokrasi

Pleno Agustus 1960 PP LEKRA, membenarkan penjimpulan Laporan Umum yang menjatakan bahwa demokrasi adalah syarat mutlak bagi kehidupan dan pembangunan daja tjipta serta kekuatan bangsa, bahwa demokrasi adalah syarat mutlak dalam rangka melaksanakan Manifesto Politik USDEK, yang berarti membina kebudayaan nasional yang demokratis dan kerakjatan dan yang wataknja anti-imperialis dan anti-feodal.

Maka itu seluruh pekerjaan kebudayaan Rakyat, setiap seniman dan sardjana yang demokratik dan patriotik hendaklah menjisihkan liberalisme dan demokrasi dan membela itu dari bahaya fasisme.

Pleno Agustus 1960 PP LEKRA sesudah mendengarkan laporan pekerjaan anggota di-daerah, berpendapat bahwa pelarangan pertunjukan dan kegiatan kesenian seperti pelarangan

pertundjukan drama "Saija dan Adinda" di Kupang, pelarangan pertundjukan drama "Batumerah Lembah Merapi" dan "Sangkar Madu" di beberapa tempat di Sumatra Utara, pelanggaran tari "Blondjowarung" di Kediri dan beberapa lainnya yang telah dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah, sangat tak sesuai dengan pelaksanaan Manifesto Politik USDEK dilapangan kebudayaan.

Sidang Pleno PP LEKRA, karenanya meminta perhatian Pemerintah Pusat, Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan beserta Departemen Kepolisian Negara untuk memberikan bantuannya yang patut, agar pelarangan-pelarangan seperti itu dihindari dan agar seniman-seniman dan pekerja-pekerja kebudayaan Rakyat dapat berbuat lebih banyak lagi bagi negeri dan Rakyatnya, sebagaimana digariskan oleh Manifesto Politik.

Tentang Kepribadian Nasional

Sesudah mendengarkan Laporan Umum mengenai masalah "kembali kepada kepribadian nasional", sidang Pleno berkesimpulan bahwa, "kembali kepada kepribadian nasional" bagi Rakyat Indonesia, pada hakekatnya harus berarti kembali kepada jalan penyelesaian Revolusi Agustus 1945. Karena itu, kembali kepada kepribadian nasional itu, sewajarnya berarti melaksanakan tuntutan-tuntutan Revolusi Agustus 45 setjara konsekwen dan disegala lapangan, termasuk lapangan kebudayaan.

Tentang BMKN

Pleno Agustus 1960 Pimpinan Pusat LEKRA, sesudah mendengarkan laporan dari utusan-utusan LEKRA ke kongres BMKN, Djuli yang bulan lalu, membenarkan kebidjaksanaan utusan LEKRA pada Kongres tersebut.

Sidang Pleno sangat menjesalkan sikap pengurus BMKN dan Kongresnya yang bulan lalu itu, yang tidak dapat menyetujui "Manifesto Politik" sebagai landasan semua kegiatannya dimasa-masa depan. Djika sikap yang demikian diteruskan, apalagi djika Pengurus BMKN tak akan terdiri dari orang-orang yang sungguh-sungguh sedia dan tulus melaksanakan "Manifesto Politik", Pleno Agustus LEKRA berkesimpulan bahwa BMKN akan tetap sukar untuk hidup dan berkembang.

Karena sikapnya yang demikian itu langsung bertentangan dengan azas dirinya sendiri, jaitu "kerakjatan", dan karena tindakan-tindakan pengurusnya dalam beberapa tahun belakangan ini yang praktis telah mengasingkan BMKN dari perjuangannya Rakyat, istimewa tentu dilapangan kebudayaan, maka Sidang Pleno Agustus LEKRA terpaksa harus menjimpulkan bahwa sebagai badan kontrak dan badan musjawarah nasional dilapangan kebudayaan BMKN ini dalam kenyataan sekarang telah menjadi sangat tidak representatif lagi.

Suatu "overkoepeling" yang diperlukan adalah "overkoepeling" atau "samenbundeling" semua "revolusioner krachten", dan bukan dari "alle krachten" seperti yang djadi pendirian pengurus BMKN.

Tentang Pendidikan Kesenian bagi Pemuda dan Anak-anak.

Walaupun laporan umum SPP LEKRA telah menjimpulkan bahwa sedjak sesudah Kongres Nasional ke I LEKRA hingga dimasa-masa achir ini telah berlangsung beberapa kali gelombang kegiatan kebudajaan Rakjat jang massal dan jang bersatu dengan gerakan-gerakan perjuangan-perjuangan Rakjat jang lagipula merata keseluruh negeri, kegiatan mana menandakan hidupnja vitalitet gerakan kebudajaan Rakjat jang menggembirakan, namun Sidang Pleno Agustus PP LEKRA menjadari betul bahwa "Kebudajaan" imperialis, terutama "kebudajaan" imperialisme Amerika Serikat, lewat film, lewat batjaan-batjaan bedjat, lewat musik-musikken untuk kali sadja dan sebagainja, masih tetap menggerogoti patriotisme dan alam revolusieoner pemuda peladjar-peladjar dan penduduk kota-kota besar kita, hal mana tetap merupakan bahaja bagi perkembangan kebudajaan maupun kepribadian nasional kita.

Walaupun PJM Presiden telah menjerahkan kepada pemuda-peladjar supaja melawan "kebudajaan" imperialis dan mendukung kebudajaan nasional kita, sedang Jang Mulia Menteri PPK Prof. Dr. Prijono kemudian telah menginstruksikan "Sapta Usaha Tama" kepada dunia pengadjaran, namun usaha-usaha praktis pemerintah untuk menguasai sumber-sumber invasi dan subversi kebudajaan imperialis, seperti import film dan perbioskopian, import piringan hitam dan lektur-lektur bedjat, terasa masih belum memadai betul.

Oleh karena itu demi mentjegah terlepasnja pemuda peladjar serta kanak-kanak kita dari akarnja, jaitu dari kepribadian nasional, dari kebudajaan Rakjat kita sendiri. Pleno Agustus 1960 PP LEKRA berpendapat, sudah sangat urgen untuk mengembangkan kegiatan kebudajaan dikalangan pemuda peladjar dan memberikan perhatian jang tjukup terhadap perubahan kerdja kesenian bagi kanak-kanak, termasuk anak-anak sekolah Taman Kanak-kanak dan sekolah Rakjat. Disamping itu, sudah tentu akan sangat baik pula sekiranja pendidikan dan kegiatan kreatif anak-anak itu sendiri kita kembangkan baik dilingkungan persekolahan maupun kegiatan menjanji, menari, menggambar dan mengarang.

Tentang Departemen Kebudajaan

Pleno Agustus, sesudah meninjau kegiatan kebudajaan nasional kita dewasa ini jang pada pokoknja sudah meluas, berkesimpulan, bahwa untuk terus mengkonsolidasi perkembangan kegiatan kebudajaan tersebut, sudah dirasakan perlu adanja suatu Departement Kebudajaan.

Tentang Lambang, Lagu dan Pandji-pandji LEKRA

Sekretariat Pimpinan Pusat LEKRA ditugaskan oleh Pleno Agustusnja untuk menjusun sebuah seruan umum agar sebanjak mungkin seniman dapat menjumbangkan ketjakapanja dalam merantjangkan lambang dan lagu LEKRA.

Mengenai lagu LEKRA, Pleno PP LEKRA menetapkan bahwa hendaklah ditempuh tjara seruan umum untuk meminta bantuan penjair-penjair mengubah sadjak-sadjak bagi lagu LEKRA tersebut. Sesudah sadjak-sadjak itu ada, barulah dibuka kesempatan untuk mengubah lagu LEKRA itu sendiri.

Pleno Agustus 1960 PP LEKRA mengharapkan agar dalam waktu 6 bulan sesudah Pleno Agustus, smeua rantjangan lambang maupun sadjak-sadjak bakal lagu LEKRA tersebut, hendaknja sudah ada ditangan SPP LEKRA.